

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Berdasarkan *website* resmi kominfo.go.id, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki cakupan untuk membidangi urusan pemerintahan, yaitu informasi dan komunikasi. Kemenkominfo yang terletak di bawah naungan langsung dari Presiden Republik Indonesia sehingga mempunyai tugas inti untuk melaksanakan urusan pemerintahan negara dalam bidang komunikasi dan informatika.



Gambar 2. 1 Sejarah Kemenkominfo

(Sumber: kominfo.go.id)

Pada awal kemerdekaan tahun 1945 s.d 1999, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki nama, yaitu Departemen Penerangan

(Deppen). Dengan dibentuknya Departemen Penerangan ini, bertujuan untuk mengadakan penerangan di Indonesia dengan sarana radio, film, dan mesin ketik. Pada tahun 1971, Departemen Penerangan memiliki misi untuk mengoptimalkan kinerja sarana di media massa. Pada tahun tersebut, mulai membentuk penerangan di daerah – daerah untuk tingkat kabupaten dan kecamatan. Selain penerangan, terdapat sarana pribadi seperti media radio, televisi, dan pers penerbitan.

Pada tahun 2001, Departemen Penerangan mengubah namanya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneq Kominfo). Pada tahun tersebut, tugas dan fungsi tidak memiliki perubahan. Namun, untuk tingkat provinsi kelembagaan penerangan disesuaikan dengan nama di kantor wilayah provinsi masing - masing dan instrumennya juga sesuai dengan kepentingan daerah. Hal ini guna untuk pemerataan dalam mendapatkan sarana dan prasarana penerangan.

Namun, pada tahun 2005 kembali berganti nama menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Dengan memiliki tugas pokok untuk menyebarkan informasi secara nasional dan mengakses informasi secara transparansi. Hal ini berguna untuk membangun infrastruktur telekomunikasi secara merata berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet sebagai kepentingan warga Indonesia. Tidak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membuat kebijakan baru untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat Indonesia dengan memberikan dukungan komunikasi yang lebih strategis. Hal ini bertujuan untuk membangun integrasi nasional.

Pada tahun 2011, telah diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeneq Kominfo). Dengan mempunyai tanggung jawab untuk menyusun berbagai macam kebijakan, seperti kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Kebijakan ini bertujuan untuk sebagai panduan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuan tertentu.

2.1.1 Visi dan Misi Kemenkominfo

Kemenkominfo mempunyai visi dan misi yang merujuk kepada visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia. Saat ini, visi dan misi Kemenkominfo hanya melanjutkan dari masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2014 s.d 2019, yaitu percepatan, pengembangan, dan kemajuan. Adapun visi dan misi Kemenkominfo berdasarkan website kominfo.go.id, sebagai berikut:

A. Visi

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Berlandaskan Gotong Royong.

B. Misi

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan keadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Kemenkominfo

Berdasarkan website resmi kominfo.go.id, Kemenkominfo mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintahan, diantaranya:

A. Tugas Kemenkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam membantu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan negara di dalam bidang komunikasi dan informatika.

B. Fungsi Kemenkominfo

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya, perangkat POS, informatika, tata kelola aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi serta komunikasi publik.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya, perangkat POS, informatika, tata kelola aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi serta komunikasi publik.
3. Melaksanakan bimbingan teknis dan *supervise* atas pelaksanaan sumber daya, perangkat POS, informatika, tata kelola aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi serta komunikasi publik.
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya di bidang komunikasi dan informatika.
5. Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkominfo.
6. Memberikan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Bertanggung jawab atas barang milik negara di lingkungan Kemenkominfo.
8. Melakukan pengawasan tugas di lingkungan Kemenkominfo.

2.1.2 Logo Kemenkominfo



Gambar 2.2 Logo Kemenkominfo

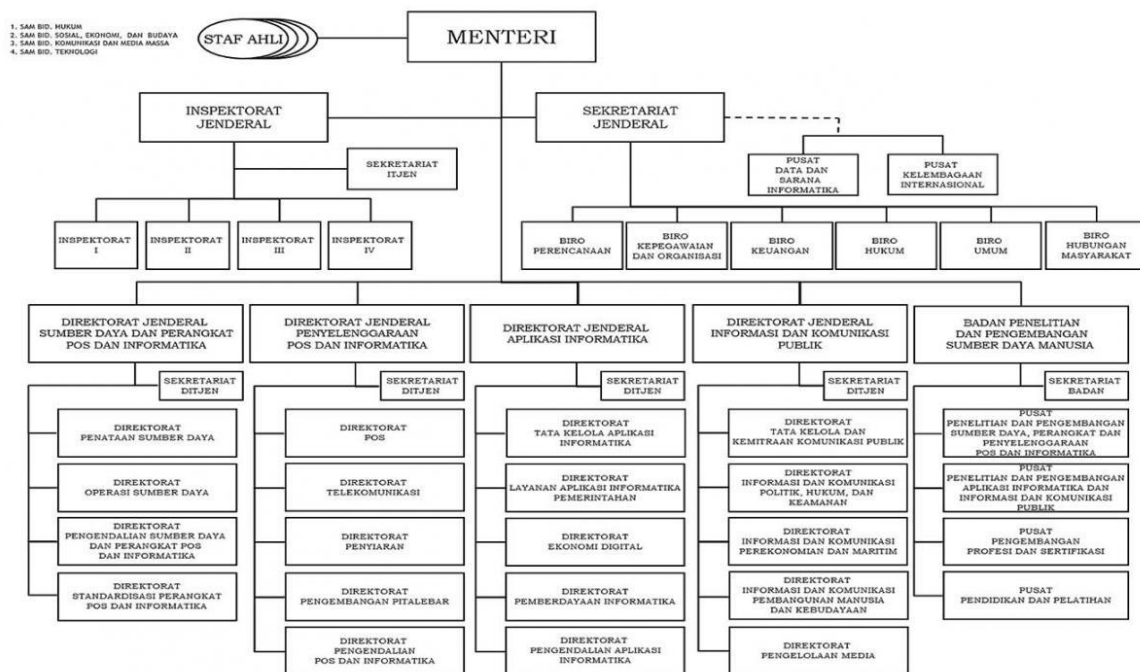
(Sumber: kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai logo yang dominan dengan warna biru. Warna biru juga identik dengan teknologi, karena dapat menggambarkan perkembangan teknologi dan komunikasi digital. Selanjutnya, untuk bentuk logo Kemenkominfo terinspirasi dari

“keong”. Hal ini karena keong dijadikan alat komunikasi oleh masyarakat Indonesia di bagian Timur. Logo tersebut memiliki arti “3C” yaitu, *Communication Infrastructure, Communication Information, dan Communication Content* (Kominfo, 2015).

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan website resmi kominfo.go.id Kemenkominfo dipimpin oleh ketua Menteri, yaitu Bapak Budi Arie Setiadi, S.Sos., dan beberapa staf ahli. Pada Gambar 2.3 dibawah, gambar tersebut merupakan struktur organisasi Kemenkominfo:

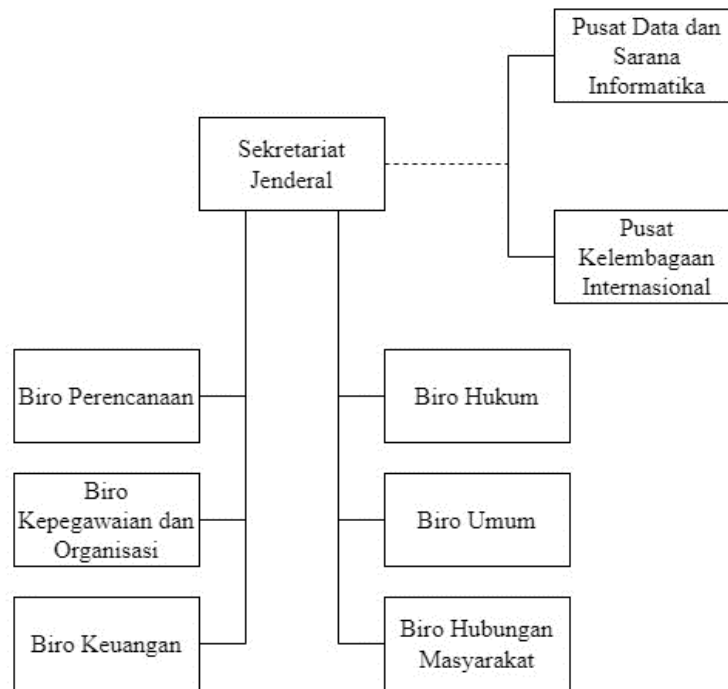


Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kemenkominfo
(Sumber: kominfo.go.id)

2.2.1 Ruang Lingkup Sekretariat Jenderal Kemenkominfo

Sekretariat Jenderal Kemenkominfo mempunyai beberapa bagian atau divisi, untuk membantu dalam mengerjakan seluruh tugas di Kemenkominfo. Pada Gambar 2.4 dibawah ini, merupakan struktur

organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkominfo yang dipimpin oleh Ibu Mira Tayyabi, S.T.,M.SEE.

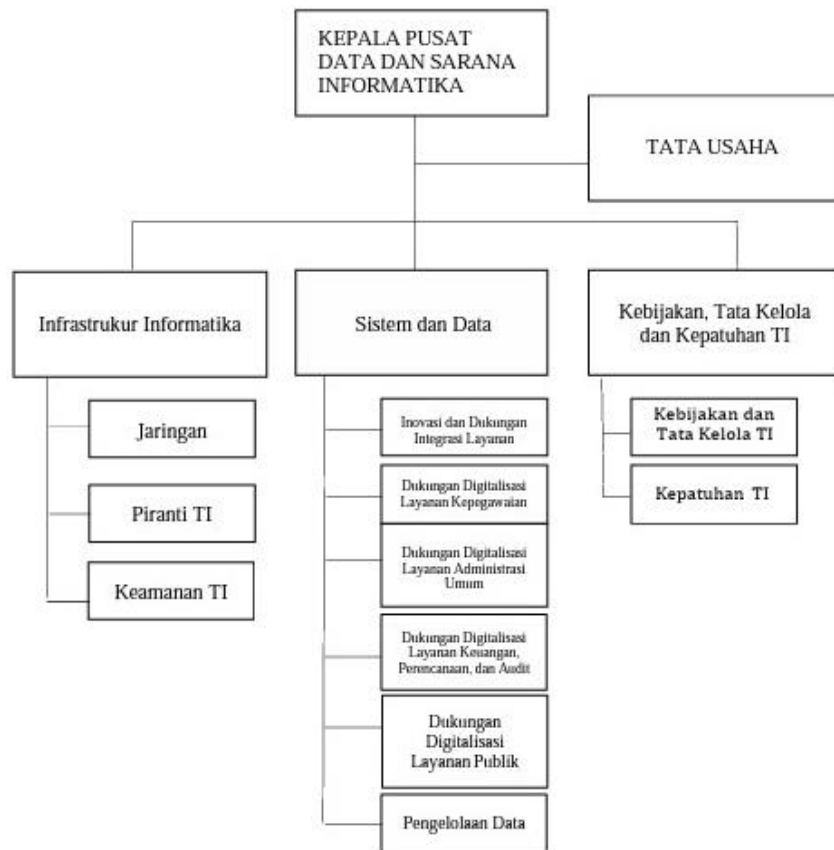


Gambar 2.4 Struktur Organisasi di Ruang Lingkup Sekretariat Jenderal Kemenkominfo

(Sumber: website kominfo.go.id)

2.2.2 Ruang Lingkup Pusat Data dan Sarana Informatika

Praktikan ditempatkan di Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) dalam bidang sistem dan data, dan dalam subbidang dukungan digitalisasi layanan public. PDSI terletak langsung di dalam tanggung jawab menteri melalui Sekretariat Jenderal. Adapun struktur organisasi dari Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI), terdapat tiga (3) lingkup, yaitu infrastruktur informatika, sistem dan data, dan kebijakan, tata kelola dan kepatuhan teknologi informasi.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi di Ruang Lingkup Pusat Data dan Sarana Informatika

(Sumber: Kepala Divisi Digitalisasi Layanan Publik)

Pada gambar 2.5 diatas, gambar tersebut merupakan struktur organisasi di dalam ruang lingkup Pusat Data dan Sarana Informatika, yang dipimpin oleh Ibu Dr. Ir. Irawati Tjipto Priyanti., M.T, selaku kepala Pusat Data dan Sarana Informatika. Praktikan selama melakukan kegiatan kerja profesi ditempatkan di divisi dukungan digitalisasi layanan publik. Pada divisi tersebut dipimpin langsung oleh Ibu Retno Dewiyanti, S.T dan beberapa jajarannya.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempunyai tugas pokok, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pada tugas tersebut, Kemenkominfo

ditugaskan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan tersebut di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk Bidang Pusat Data dan Sarana Informatika, dan pada divisi digitalisasi layanan publik memiliki kegiatan umum berupa tugas untuk membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi, seperti Portal Layanan Terintegrasi Kominfo, Hub OSS Kominfo, Seleksi Kominfo, dan Website Kominfo. Hal ini berguna untuk membantu Kemenkominfo dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan bermanfaat bagi masyarakat karena didalamnya terdapat layanan-layanan yang bisa digunakan. Layanan tersebut seperti layanan pemerintah, layanan non pemerintah, perizinan, aduan konten, dan lain – lain.

Setelah website itu dikembangkan oleh para developer, maka akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah ada *bug* atau *error*. Setelah melalui tahapan pengujian, maka akan dilakukan dokumentasi untuk panduan penggunaan dari *website* tersebut. Panduan penggunaan pun dibuat juga untuk nantinya dipresentasikan kepada para satuan kerja di Bidang Pusat Data dan Sarana Informatika.